

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) EKONOMI BERGULIR KELOMPOK DI
KELURAHAN SAIL KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2009-2013**

Oleh :

Ermita Rahayu

Dosen Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Ermita_rahayu@yahoo.co.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study wants to investigate and analyze the implementation of the National Program for Urban Community Empowerment (PNPM-MP) Revolving Economic Groups in the Village District of Tenayan Raya, Sail Pekanbaru in 2009-2013. The background of this study is that not yet implemented effective government policy in tackling poverty through the National Program for Community Empowerment Urban (PNPM-MP) Revolving Economic Group in the period 2009-2013 originating from the target inaccuracy of loan programs that are not based on the goals and objectives of the program that prioritizes the poor and the occurrence of non-payment of loan funds by the community of users and also a growing perception in the community to be one because people assume that it is a loan assistance program grant from the government so that there is abuse of the loan funds.

This study aims to find out what are the factors that affect the implementation of the PNPM-MP group in the Village Economic Revolving Sail Year 2009-2013 is based on the theory of public policy and public policy implementation. This study used qualitative methods are implemented in the Village Sail, the data obtained either directly or indirectly, which is then analyzed using descriptive data analysis techniques.

Based on the research that has been done is used the Theory of Edward III Policy. Researchers concluded the implementation of the PNPM-MP group in the Village Revolving Economic Sail in 2009-2013 is not going well as what to expect in the Guidelines for the implementation of the program. The factors that affect the implementation of the National Program for Community Empowerment (PNPM-MP) Revolving Economic Group of the Year 2009-2013 is the communication factor is the lack of socialization programs to the community, the resource factors such as office facilities and equipment inadequate support in the implementation of the program, disposition of implementing which is not supported with an incentive or reward by implementing programs that it is still not enough of course affect motivation program implementers.

Keywords: Implementation, PNPM-MP Revolving Economic Groups.

A. Pendahuluan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) adalah merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan umum PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/desa sebagai peserta program dan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun 3 (tiga) usulan kegiatan yang didanai PNPM-MP ialah kegiatan fisik, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi bergulir.

Dalam pelaksanaan Program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok dilaksanakan di kota Pekanbaru, Salah satunya Kecamatan Tenayan Raya yang merupakan kecamatan memiliki rumah tangga miskin terbanyak dan dengan kondisi perekonomian masyarakat menengah kebawah. Dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Sail memiliki jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM). Pelaksanaan PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail dimulai sejak Tahun 2009. Adapun tujuan dari program ini khususnya di Kelurahan Sail untuk membuat masyarakat yang kurang mampu atau miskin dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dengan bentuk bantuan pinjaman bergulir kelompok. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok ini tentunya tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, adapun ditingkat Kelurahan yaitu Lurah yang berfungsi mengawasi langsung berjalannya program tersebut dan dibantu oleh LKM (lembaga kswadayaan masyarakat) yang menjadi pelaku

pelaksanaan program yang bekerja untuk mensosialisasikan dan melayani masyarakat dalam proses program tersebut. Tetapi kenyataan dilapangan pelaksanaan program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok ini masih banyak warga yang masuk dalam target sasaran bantuan pinjaman bergulir kelompok ini justru tidak menerima bantuan program tersebut dan sebaliknya warga yang dikatakan mampu juga dapat menikmati bantuan program tersebut. Disamping permasalahan itu, Pada pelaksanaan ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail pada tahap penyeleksian anggota yang menjadi penerima bantuan program masih belum maksimal. Dalam tahap penyeleksian anggota penerima bantuan, berdasarkan didalam petunjuk teknis pinjaman bergulir tim pelaksana program melakukan seleksi dan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat dengan yang menjadi dasar penentuan anggota kelompok ekonomi bergulir adalah keluarga miskin yang berstatus ekonominya lemah dan memiliki usaha yang produktif. Pada pelaksanaan penyeleksian terdapat tahapan penilaian terhadap proposal yang diajukan dan melakukan kunjungan lapangan terhadap usaha yang diajukan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penyeleksian di Kelurahan Sail, petugas hanya menilai dari pengajuan proposal catatan memiliki usaha tanpa melakukan penilaian kelayakan peminjam dan kunjungan tempat usaha yang diajukan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi bergulir kelompok terjadi penyalahgunaan dana pinjaman yang tidak tepat kegunaannya.

PNPM ekonomi bergulir kelompok dalam pelaksanaannya ada sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu keberhasilan anggota dalam memanfaatkan atau menggunakan dana sehingga ini berpengaruh terhadap kelancaran dalam pengembalian

pinjaman dana. Keberhasilan anggota kelompok ekonomi bergulir ini dapat terlihat dari kesuksesan usaha dan keadaan ekonominya yang baik, namun dalam pelaksanaan ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dilapangan, terjadinya penunggakan yang disebabkan kemacetan usaha dan penyalahgunaan dana dari perilaku kelompok yang tidak baik sehingga berpengaruh terhadap perguliran dana Ekonomi Bergulir Kelompok. dari tahun 2010 sampai 2013 pelaksanaan program ekonomi bergulir ini terjadi penunggakan dana. Berdasarkan dari beberapa fenomena di atas, dalam pelaksanaan PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok yang belum optimal, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM-MP) Ekonomi Bergulir Kelompok Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 2009-2013”**.

B. Rumusan Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui factor-faktor saja yang menyebabkan pelaksanaan program PNPM-MP Ekonomi Bergulir kelompok di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013 belum optimal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan pelaksanaan program PNPM-Mp ekonomi bergulir kelompok.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang Pelaksanaan program PNPM-MP

E. Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Riant Nugroho, 2003:158). Menurut Edwards III, (AG. Subarsono 2005) menyatakan dalam melihat suatu implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator penting, antara lain yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang dilakukan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan dan begitu juga dengan sumber daya financial yang merupakan kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan untuk menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa ada dukungan financial yang memadai, program atau kebijakan tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Disposisi/ sikap adalah watak dan karakteristik yang dinilai oleh implementator. Seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh Dalam implementasi kebijakan. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dukungan pelaksana mentaati program atau aturan yang berlaku merupakan penunjang keberhasilan suatu program atau kebijakan. Kesediaan aparat pelaksana untuk mentaati prosedur yang sudah ditetapkan sesuai petunjuk teknis yang baik, maka kebijakan dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Sikap para pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tepe*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu tempat yang terkait dengan pelaksanaan program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

data hasil dari wawancara bersama key informan yang ikut terlibat dalam program PNPM mandiri perkotaan ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya yang nantinya diharapkan akan memberikan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan program tersebut.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti untuk melengkapi data primer yang didapat seperti laporan-laporan, jurnal, dan lampiran data yang lain yang dipublikasikan yang mendukung dan menjelaskan masalah penelitian. Seperti Peraturan Perundang-

undangan, jumlah pemanfaat PNPM-MP pinjaman bergulir kelompok, data lain yang relevan.

3. Informan

Informan penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian.

Tabel: 1.1 Daftar Imformen

No	Jabatan
1.	Koordinator PNPM-MP
2.	Lurah
3.	LKM
4.	UPK
5.	Masyarakat

3. Teknik Pengumpulan Data

a. observasi

Merupakan pengamatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Marzuki, 2000: 62). Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap responden, yaitu untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi bergulir kelompok.

b. Wawancara

Wawancara Mendalam (*Indept Interview*) adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pertanyaan yang tidak berstruktur, dengan menggunakan alat perekam dan alat penulis.

c. Dokumentasi

yaitu pengumpulan data dengan mengumpuilakn informasi yang berupa dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini yang meneliti peroleh dari Kantor Kelurahan Sail dan Kantor PNPM Mandiri Sejahtera di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

5 Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dilakukan

pemilihan-pemilihan, kategorisasi dan evaluasi data. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan diteliti kembali, hal ini untuk melihat kelengkapan hasil dari wawancara dan observasi apakah sudah sesuai dengan pedoman wawancara yang disusun sebelumnya serta juga kesesuaian pada jawaban yang satu dengan yang lainnya. Keseluruhan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut akan diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang logis agar bisa dimengerti dan mudah dipahami pada tiap-tiap data yang dikumpulkan. Kemudian menguraikan pada bagian-bagian permasalahan dengan sub-sub judul pada bab-bab dalam penulisan penelitian. Kemudian hasil dari pembahasan ini dirumuskan suatu kesimpulan dan saran.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi program. Suatu program dapat dilakukan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksan, dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Komunikasi yang dilakukan berbentuk sosialisasi program.

2. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan dan begitu juga dengan sumber daya financial yang merupakan kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan untuk menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa ada dukungan financial yang memadai, program atau kebijakan tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun maksud Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok adalah ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan program sedangkan sumber daya financial dalam program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok ini berasal dari dana BLM dan Pentaskin.

3. Disposisi

Dukungan pelaksana mentaati program atau aturan yang berlaku merupakan penunjang keberhasilan suatu program atau kebijakan. Kesiapan aparat pelaksana untuk mentaati prosedur yang sudah ditetapkan sesuai petunjuk teknis yang baik, maka kebijakan dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Dalam hal ini mengenai sikap pelaksana dalam melaksanakan program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail sangat mendukung program tersebut. Pada variabel disposisi ada hal yang penting yang perlu dicermati yaitu insentif, ini sangat mempengaruhi sikap dan komitmen pelaksana, dengan pemberian insentif yang memadai. Namun dalam pelaksanaan program

PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail insentif yang diberikan kepada pelaksana program masih minim, sehingga mempengaruhi motivasi para pelaksana program.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tepe*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dalam pelaksanaan program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail struktur organisasi yang menjalankan program atau yang bertanggung jawab terhadap program tersebut adalah Unit Pengelolaan Keuangan (UPK). Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *re tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pelaksanaan suatu program memerlukan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan PNPM-MP ini khususnya ekonomi bergulir kelompok, sudah disediakan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Jadi semua prosedur-prosedur maupun aturan-aturan yang harus diikuti sudah ada didalam PTO tersebut.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan Dari hasil penelitian penulis diharapkan bahwa implementasi program nasional pemberdayaan

masyarakat di kelurahan Sail belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu di perbaiki seperti dalam penyeleksian calon peminjam dana bergulir tersebut yang seharusnya lebih selektif.

Dan ada beberapa faktor yang dominan mempengaruhi pelaksanaan program PNPM-MP Ekonomi Bergulir Kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Dalam faktor Komunikasi masih banyaknya masyarakat yang merupakan sasaran program PNPM-MP Ekonomi Bergulir Kelompok yang belum memahami maksud dari tujuan program, dan juga terlihat masih banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program PNPM-MP Ekonomi Bergulir Kelompok.
2. Sumber daya financial berupa fasilitas belum ada untuk menjadi tempat berlangsungnya pelaksanaan program PNPM-MP
3. Disposisi, sikap para pelaksana program di kelurahan Sail mendukung adanya program PNPM-MP ini, dalam hal ini inefektif atau upah pelaksana program di Kelurahan Sail masih belum cukup. Ini tentunya mempengaruhi motivasi para pelaksana program di Kelurahan Sail.
4. Struktur Birokrasi yaitu Struktur organisasi LKM Kelurahan Sail masih belum memenuhi prosedur yang berlaku karena hanya terdiri dari koordinator, sekretariat, tambahan divisi dan 3 (tiga) unit pengelola yaitu UPK, UPL dan UPS. Masih terdapat kekurangan pada struktur organisasinya yaitu kurang pengawas.

2.Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pembahsan,

,mengenai pelaksanaan program PNPM-MP Ekonomi Bergulir Kelompok di Kelurahan Sail. Perlu di perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Pelaksanaan program PNPM-MP dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin dapat berjalan efektif, maka hendaknya dilakukan evaluasi secara periodik untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijaksanaan tersebut.
2. Pelaksanaan program PNPM-MP ekonomi bergulir yang tujuannya dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin agar dapat berjalan efektif, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijaksanaan yaitu meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi agar pelaksanaan kegiatan PNPM-MP ekonomi bergulir dimasa yang akan datang dapat terlaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin.
3. Meningkatkan sosialisasi program yang bersifat menyeluruh dan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mengetahui adanya Program PNPM-MP ini di daerah mereka.
4. Tim pelaksana kegiatan agar lebih selektif dalam menyeleksi calon peminjam yang akan menerima bantuan pinjaman. Mengikut sertakan RT-RW dalam proses penyeleksian terhadap calon

peminjam dana yang tentunya lebih mengetahui masyarakat yang benar-benar termasuk masyarakat miskin Agar mereka yang terpilih dalam kelompok peminjam yang sesuai dengan sasaran program dan tentunya menghindari terjadinya

penyimpangan dalam penggunaan pinjaman.

5. Dan perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan, untuk dapat melihat perkembangan usaha dan dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat sebagai pemanfaat dana.

Tangkilisan, Drs Hessel Nogi S.2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suggono, Bambang. 1994. *Hukum kebijaksanaan publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Winarno,Budi.2002. *Kebijakan Publik,Teori dan Proses Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

Zulkarnain. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: Ardana Media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisa kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino Leo.2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Crescent, Tim. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dwidjowijoto, R. N, 2007. “*Analisis Kebijakan*”. Jakarta: Elek Media Komputindo

Ginandjar, Kartasasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo

Kismartini, dkk, 2005. ” *Analisis Kebijakan Publik*”. Jakarta: Universitas Terbuka

Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mandar Maju.

Mudiyono, dkk, 2005. *Dimensi-dimensi masalah sosial dan pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: ADMP Press

Mulyatiningsih, 2011, *Pengantar Evaluasi Program*, Jakarta: Rineka Cipta

Nugrobo, Riant.2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komutindo.

Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy, Analisi, Strategis, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN

Rujukan Perundang-Undangan

UUD 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Sumber Lainnya:

Petunjuk teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir PNPM perkotaan

Kmw1riau.blogspot.com/2010/04/implementasi-kebijakan-nangkis-kota.html